

## **JURNAL**

**TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PERSEKUTUAN ADAT (LPA) LAPE  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT  
ADAT LAPE UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI  
KABUPATEN NAGEKEO-FLORES- PROVINSI NTT  
(Studi Kasus Sengketa Tanah Kantor DPRD Nagekeo)**



**Disusun oleh:**

**YOSEPH SOA SEDA**

**NPM : 090510058**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL**

**TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PERSEKUTUAN ADAT (LPA) LAPE  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT  
ADAT LAPE UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI  
KABUPATEN NAGEKEO-FLORES- PROVINSI NTT  
(Studi Kasus Sengketa Tanah Kantor DPRD Nagekeo)**



**Disusun oleh:**

**YOSEPH SOA SEDA**

**NPM : 090510058**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan  
Hidup**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 17 Desember 2015**

**Dosen Pembimbing I**

**S. W. Endah Cahyowati, SH., MS.**

**Dosen Pembimbing II**

**Dr. C. Woro Murdiati, SH., M.Hum**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FX Endro Susilo, SH, L.LM.**

## **ABSTRACT**

Land is the basic human right which is important value, strategic and special for indigenous peoples in Indonesia. Indigenous peoples in Indonesia have particular rights, including the land rights, which is termed as customary or communal rights. Communal lands of the indigenous peoples in the Nagekeo Regency, often generates an importance dispute, such as the communal land of the Lape indigenous peoples. Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape as a traditional institution of the Lape indigenous peoples has an important role in the dispute resolution of Lape communal land in accordance with its duties and functions. Based on that background, the authors take the title of a mini thesis, “Duties and Functions of Lembaga Persekutuan Adat Lape (LPA) Lape in Dispute Resolution of Communal Land of the Lape Indigenous Peoples to Fulfil the Rule of Law in Nagekeo Regency-Flores-NTT Province (The Case Study of Land Dispute of Nagekeo Parliament Office). Legal issues on this thesis is, How the duties and functions of Lembaga Persekutuan Adat (LPA) in dispute resolution of Communal Land of the Lape Indigenous Peoples? The second issues is, Are the duties and functions of Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape in dispute resolution have fulfilled the rule of law in the Nagekeo Regency-Flores-NTT Province? Law research on this thesis is normative law research focuses on the positive legal norms and requires secondary data (material law) as the primary data. The methods of data collection in the thesis uses literature study with data analysis method in the form of a qualitative method. The result of legal research concluded that the duties and functions of Lembaga Persekutuan Adat Lape (LPA) Lape has been implemented on non-litigation and litigation resolution methods. The duties and functions of the Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape have fulfilled the rule of law on the land which is the object of the dispute.

Keyword: LPA Lape, the Lape Indigenous Peoples, Lape Communal Land Dispute

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa kepada seluruh makhluk hidup di muka bumi. Manusia sebagai bagian dari makhluk hidup dipercayakan untuk menguasai, menggunakan serta memanfaatkan tanah tersebut. Manusia diberikan kepercayaan tersebut karena memiliki akal budi, sehingga dapat menguasai, menggunakan serta memanfaatkan tanah dengan arif dan bijaksana. Pandangan kosmis religius tersebut menjadi landasan bahwa tanah merupakan hak dasar setiap manusia. Tanah sebagai hak dasar setiap manusia yang bernilai penting dan strategis.

Tanah bernilai penting dan strategis bagi manusia karena secara lahiriah manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah. Hubungan antara tanah dengan manusia maupun masyarakat tidak dapat dipisahkan karena tanah merupakan tempat dari manusia tumbuh dan berkembang serta penunjang kehidupan manusia. Pandangan itu menjadi landasan pemikiran bahwa tanah mempunyai arti dan makna yang sangat istimewa. Tanah yang bernilai penting dan strategis serta istimewa tersebut disadari bahkan dipahami oleh masyarakat adat yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tanah juga dipandang sebagai simbol pemersatu serta harga diri dari masyarakat adat tersebut.

Masyarakat adat memandang tanah sebagai suatu sarana terhadap pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pandangan itu berdasarkan pada fakta bahwa tanah merupakan tempat berburu, memungut hasil hutan, areal pertanian dan peternakan. Pandangan serta fakta itu mengakibatkan suatu masyarakat adat memiliki keterikatan dengan wilayah yang berada di sekitarnya. Keterikatan tersebut terjadi karena wilayah di sekitarnya telah didiami bahkan telah dikuasai dalam waktu yang lama. Keterikatan yang telah terjadi tersebut mendasari pandangan bahwa tanah yang dikuasai dan dimilikinya merupakan wilayah tumpah darahnya. Pandangan itu menjadi

dasar bagi masyarakat adat guna melindungi tanah atau wilayah yang telah dikuasai dan bahkan dimilikinya dari kekuasaan atau orang-orang dari luar masyarakat adat tersebut.

Fakta tersebut menunjukan arti penting dan strategis dari tanah bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Arti penting dan strategis dari tanah juga disadari oleh para pendiri NKRI. Ketika mendirikan NKRI, para pendiri atau *founding fathers* itu memahami pula arti penting serta strategisnya tanah. Tanah dipandang serta dipahami sebagai suatu sarana pembentuk dan pemersatu sebuah negara. Pemahaman tentang arti penting serta strategis dari tanah tersebut termuat secara eksplisit dalam Pancasila sebagai Landasan Idiil yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di NKRI. Arti dan makna dari tanah yang sangat penting serta strategis itu diatur lebih lanjut secara konstitusional. Pengaturan secara konstitusional tersebut termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi landasan konstitusional bagi Hukum Tanah Nasional di NKRI. Ketentuan yang telah diatur dalam pasal tersebut mengamanatkan bahwa Negara telah diberikan suatu kewenangan secara konstitusional untuk mengatur penguasaan, penggunaan serta pemanfaatan atas tanah dari dan oleh seluruh warganegara Indonesia, termasuk di dalamnya masyarakat adat. Penguasaan, penggunaan serta pemanfaatan atas sebidang tanah oleh suatu masyarakat adat diatur secara tegas dalam UUD 1945 hasil amandemen keempat. Pengaturan terhadap pengakuan dan penghormatan masyarakat adat tersebut diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pengaturan terhadap hak-hak masyarakat adat diatur pula secara konstitusional dalam ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pasal 18B ayat (2) serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menjadi landasan konstitusional terhadap pengakuan serta perlindungan hak-hak dari masyarakat adat.

Pengaturan pasal-pasal tersebut menjadi landasan konstitusional bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan yang telah diatur dalam dalam UUD 1945 tersebut, pada pelaksanaannya dijabarkan dalam

Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR RI) Nomor IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, khususnya Pasal 4 butir j. Pengaturan yang telah tertuang dalam Pasal 4 butir j Tap MPR Nomor IX Tahun 2001, menegaskan pengaturan yang telah tertuang secara konstitusional pada pasal-pasal dalam UUD 1945. Penegasan yang telah diamanatkan dalam ketentuan pasal-pasal tersebut dimaksudkan agar penghormatan maupun perlindungan hak-hak dari suatu masyarakat adat dipenuhi oleh negara.

Pengakuan terhadap hak-hak dari masyarakat adat atas tanah telah diatur dalam suatu undang-undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), mengatur tentang pemberian wewenang dari negara dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak dari suatu masyarakat adat. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat 4 dan dalam Pasal 3 UUPA. Pengaturan tersebut menjadi dasar hukum pengakuan Negara atas atau terhadap hak masyarakat adat atas tanah atau tanah ulayat. Pengakuan terhadap hak ulayat tersebut diberikan dengan beberapa syarat tertentu.

Persyaratan yang menjadi dasar pengakuan hak ulayat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 tersebut, yakni persyaratan mengenai eksistensinya dan pelaksanaannya. Pengakuan bersyarat dalam undang-undang tersebut memberikan kewenangan bagi masyarakat adat di Indonesia untuk menentukan pengelolaan tanah di wilayahnya. Pengelolaan tanah yang dilakukan oleh suatu masyarakat adat di dalam wilayahnya sering menimbulkan konflik atau sengketa. Penyebab dari sengketa yang terjadi baik di internal maupun eksternal masyarakat adat, karena kurangnya kesadaran masyarakat hukum adat, kurang jelas batas sepadan tanah hak ulayat dan kurang berperannya kepala adat atau lembaga adat di dalam masyarakat hukum adat<sup>1</sup>. Sengketa tersebut dialami juga oleh masyarakat

---

<sup>1</sup> Maria D. Muga, 2008, *Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi (Studi Analisa Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah-Tanah Ulayat di Kecamatan Soa-*

adat Lape yang berada di dalam wilayah Kabupaten Nagekeo. atas wilayah ulayatnya. Penyelesaian sengketa tersebut melibatkan peran dari Lembaga Persekutuan Adat (LPA) yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.

Problematika itu menarik perhatian penulis, mengenai tugas dan fungsi LPA Lape dalam penyelesaian sengketa tersebut. Berkaitan dengan tugas dan fungsi LPA Lape yang sangat penting dan strategis dalam setiap penyelesaian sengketa tersebut, maka penulis melakukan penulisan sebuah jurnal ilmiah dengan judul “Tugas dan Fungsi Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Lape untuk Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupaten Nagekeo-Flores-Provinsi NTT (Studi Kasus Sengketa Tanah Kantor DPRD Nagekeo)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tugas dan fungsi Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape dalam penyelesaian sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Lape?
2. Apakah tugas dan fungsi Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape dalam penyelesaian sengketa telah mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Nagekeo-Flores-Provinsi NTT?

## PEMBAHASAN

### A. Tinjauan tentang Masyarakat Adat, Tanah Ulayat dan Lembaga Adat

Masyarakat adat adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari suatu negara. Masyarakat adat diperkirakan berjumlah lebih dari 370 juta orang dan berada di lebih dari 70 negara di dunia pada berbagai belahan wilayah<sup>2</sup>. Masyarakat adat berada dan berdiam juga dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masyarakat adat di dalam wilayah NKRI, diperkirakan berjumlah sebesar 50 juta hingga 70 juta jiwa atau sekitar 20% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia.

Masyarakat adat itu sering difenisikan secara berbeda oleh berbagai pandangan. Masyarakat adat secara etimologis, merupakan sekelompok individu yang saling berinteraksi dalam suatu hubungan sosial karena adanya kesamaan budaya, tradisi, identitas, dan wilayah sebagai faktor pengikatnya serta diatur oleh adat istiadat dan tradisi sebagai peraturan hidup bersama. Masyarakat adat dipahami sebagai suku-suku dan bangsa yang memiliki hubungan kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya serta menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayahnya<sup>3</sup>. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur atau secara turun-temurun pada wilayah geografis tertentu dan memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya serta wilayah sendiri<sup>4</sup>. Masyarakat adat merupakan sekelompok orang atau individu dengan karakteristik tertentu.

---

<sup>2</sup> Sem Karoba, 2007, *Hak Asasi Masyarakat Adat United Nations Declaration on The Rights of Indigeous Peoples*, Yogyakarta, Galang Press, hlm 85

<sup>3</sup> A. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 361.

<sup>4</sup> C. Woro Murdiati dan B. Wibowo Suliantoro, 2011, *Rekonstruksi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Sebagai Fundasi Pembangunan Hukum Kehutanan yang Berkelanjutan*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 10.



Karakteristik merupakan identitas dan jati diri dari suatu masyarakat adat. Karakteristik tersebut terdiri atas ciri dan sifat yang melekat dalam kehidupan masyarakat adat. Ciri dan sifat yang melekat pada masyarakat adat sangat khas dan tidak dimiliki oleh masyarakat yang lain. Ciri dan sifat yang sangat khas serta berbeda tersebut dipengaruhi oleh beberapa unsur. Unsur-unsur itu antara lain faktor pengikat atau dasar pembentuk dari suatu masyarakat adat, hukum adat yang mengatur hidup bersama, struktur atau perangkat kepemimpinan adat atau penguasa adat wewenang atas kekayaannya, baik kekayaan material maupun kekayaan immaterial<sup>5</sup>.

Ciri dari suatu masyarakat adat itu ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria tersebut antara lain adat istiadat, tradisi, keberlanjutan historis, hubungan kewilayahan serta suatu lembaga sosial, ekonomi, budaya, maupun politik yang khas. Kriteria-kriteria lain sebagai penentu suatu masyarakat adat antara lain hubungan yang jelas dengan tanah atau wilayah yang secara turun-temurun dimiliki, ditinggali atau digunakan; keberlanjutan sejarah; karakteristik budaya yang jelas; non-dominan dan identifikasi diri serta kesadaran kelompok<sup>6</sup>. Karakteristik itu melekat dan menyatu dalam berbagai aspek kehidupan suatu masyarakat adat. Masyarakat adat sebagai suatu kelompok individu memiliki hak-hak tertentu yang melekat dalam kehidupan dari suatu masyarakat adat.

Hak-hak yang dimiliki oleh suatu masyarakat adat biasanya berkaitan dengan segala aspek kehidupannya. Hak-hak tersebut bersifat kolektif dan totaliter, yang bermakna hak-hak itu menjadi milik bersama dari suatu masyarakat adat serta bersifat menyeluruh. Hak-hak dari suatu masyarakat adat meliputi pula hak atas sebidang tanah atau wilayah yang berada di sekitarnya. Hak itu terjadi atau timbul karena tanah merupakan kekayaan berwujud yang paling umum dipunyai oleh suatu masyarakat adat. Hak itu sering dikenal dengan berbagai istilah diantaranya istilah hak ulayat.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>6</sup> Rafael Edy Bosko, 1999, *The Right of Indigenous Peoples in the Context of Natural Resources Development*, a master thesis in public international law, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, Faculty of Law, University of Lund, hlm. 11.

Hak atas tanah umumnya berlaku bagi bidang tanah yang berada di sekitarnya dan menjadi tempat tinggal masyarakat adat tersebut. Hak atas tanah tersebut sangat khas dan menjadi karakteristik dari masyarakat adat, karena terdapat suatu hubungan spiritual yang terjalin antara tanah dengan masyarakat adat. Hak atas tanah itu merupakan salah satu bentuk dari hak-hak tradisional, karena sifat kepemilikannya yang bersifat tradisional dan ditentukan juga oleh pendudukan masyarakat adat secara tradisional<sup>7</sup>. Hak ulayat tersebut utamanya berkenaan dengan hubungan hukum yang terjadi antara suatu masyarakat adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya<sup>8</sup>.

Hak ulayat itu memiliki dua fungsi yaitu fungsi personal dan fungsi publik. Hak ulayat masyarakat adat umumnya berkenaan dengan hak dari suatu masyarakat adat atas sebidang tanah. Tanah yang telah dilekatkan dengan hak ulayat itu sering dikenal dengan istilah tanah ulayat. Tanah ulayat dipandang sebagai tanah bersama dari para warga suatu masyarakat hukum adat yang bersangkutan<sup>9</sup>. Masyarakat adat yang berada di NKRI mempunyai tanah ulayat sebagai bagian dari kekayaannya. Kekayaan dari masyarakat adat diatur penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatannya oleh pemimpin atau kepala adatnya yang disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku dalam persekutuan adat tersebut.

Pemimpin masyarakat adat dapat berupa orang perorangan maupun dalam bentuk kelembagaan. Lembaga adat tersebut dimaknai sebagai suatu istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan<sup>10</sup>. Lembaga adat dimaknai pula sebagai suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang memiliki suatu wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri

---

<sup>7</sup> Sem Karoba, 2007, *Op.Cit.*, hlm. 66.

<sup>8</sup> Maria S. W. Sumardjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 170.

<sup>9</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6522/tanah-ulayat>, diakses pada tanggal 10 Desember 2014.

<sup>10</sup> <http://www.scribd.com/doc/221104549/Makalah-Lembaga-Adat-Dan-Peranannya#scribd>, diakses pada tanggal 10 Desember 2014.

dan berhak serta memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat<sup>11</sup>. Lembaga adat sebagai pemimpin dari masyarakat adat umumnya memiliki wewenang, tugas, fungsi dan peranan tertentu. Lembaga adat mempunyai tugas untuk mengayomi adat istiadat, hukum adat dan masyarakat adat. Lembaga adat berfungsi untuk mengkoordinir dan mengarahkan anggota dari masyarakat adat agar berperilaku dan bertindak sesuai dengan hukum adatnya.

#### **B. Tinjauan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum**

Tanah, sebagai hak ekonomi bagi setiap orang sering menimbulkan konflik bahkan sengketa<sup>12</sup>. Sengketa atau *conflict* atau *dispute*, bermakna perselisihan atau pertentangan atau ketidaksamaan antara dua pihak atau lebih<sup>13</sup>. Sengketa pertanahan umumnya terkait dengan adalah suatu proses interaksi diantara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingan atas tanah maupun benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan<sup>14</sup>. Sengketa tanah ulayat terjadi atau timbul umumnya terkait dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ulayat dari suatu masyarakat adat. Penguasaan serta pemilikan atas tanah ulayat seringkali terbentur dengan peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah.

Sengketa yang terjadi atau timbul seringkali menimbulkan dampak yang negatif bagi kehidupan bermasyarakat. Mekanisme penyelesaian sengketa sebagai upaya untuk mengeliminasi dampak yang akan timbul dari suatu sengketa yang telah terjadi. Penyelesaian sengketa merupakan serangkaian aktivitas yang diperlukan oleh para pihak yang bersengketa atau terlibat dalam sengketa tersebut, dengan menggunakan strategi untuk

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Maria S. W. Sumardjono, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm 2

<sup>13</sup>Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Arbitrase*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 19

<sup>14</sup>Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Bandung, Mandar Maju, hal 22

menyelesaikannya<sup>15</sup>. Mekanisme penyelesaian atas sengketa secara umum terdiri dari dua bentuk atau sistem yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian terhadap suatu sengketa melalui peradilan, sedangkan non-litigasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar peradilan atau penyelesaian sengketa alternatif yang sering dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Prinsip yang dikedepankan oleh kedua sistem tersebut berbeda antara satu dengan yang lain. Proses litigasi lebih menitikberatkan prinsip menang-kalah dalam penyelesaian atas suatu sengketa. Sistem non-litigasi lebih mengedepankan prinsip *win-win solution* sebagai hasil dalam penyelesaian tersebut.

Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan untuk memenuhi dan menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang telah melakukannya. Setiap orang, dengan adanya kepastian hukum dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi<sup>16</sup>. Kepastian hukum dalam suatu sengketa pertanahan adalah kepastian hukum atas data fisik dan data yuridis dari obyek atau tanah yang dipersengketakan oleh para pihak. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas dari bidang tanah sengketa sedangkan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pemegang haknya dan hak dari pihak lain. Kepastian hukum itu berlaku juga dalam mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat adat.

### **C. Tugas dan Fungsi Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Lape Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum**

---

<sup>15</sup>Maria D. Muga, *Op.Cit.*, Hlm 29

<sup>16</sup>Mahfud MD, *Penegakan Hukum Pengelolaan Tata Pemerintahan yang Baik*, Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Jakarta, 8 Januari 2009.

Masyarakat adat Lape adalah masyarakat adat yang mendiami wilayah Flores Tengah bagian utara. Wilayah yang didiami tersebut berada di Kabupaten Nagekeo bagian utara atau yang dikenal dengan nama dataran Mbay. Masyarakat adat Lape mendiami suatu wilayah yang termasuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Aesesa di Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT<sup>17</sup>. Masyarakat adat Lape terbentuk dari persekutuan tujuh “woe” atau suku. Ketujuh woe atau suku yang membentuk persekutuan tersebut terdiri atas Suku Woerenge, Suku Nakazalewawo, Suku Nakanawe, Suku Ko, Suku Nakazaleau, Suku Rogawawo dan Suku Rogaau. Persekutuan dari ketujuh suku tersebut mengidentifikasikan dirinya dengan nama Masyarakat Adat Lape.

Kata “Lape” yang digunakan itu berasal dari bahasa daerah yang bermakna berlapis-lapis keturunan. Masyarakat adat Lape mempunyai karakteristik yang khas sebagai bagian dari identitasnya. Karakteristik yang khas tersebut meliputi sejarah asal-usul, adat istiadat dan tradisi, pandangan atas dunia, bahasa, filsafat, sistem kemasyarakatan, simbol pemersatu, struktur kelembagaan adat serta wilayah ulayat. Wilayah ulayat dari masyarakat adat Lape tersebut berada di sebagian wilayah kecamatan Aesesa dan kecamatan Aesesa Selatan. Wilayah ulayat dari masyarakat adat Lape yang sangat luas tersebut sering menimbulkan sengketa yang berkaitan dengan tanah ulayatnya. Sengketa atas tanah ulayat terjadi pula di lokasi yang bernama Pomamela yang merupakan bagian dari wilayah ulayat masyarakat adat Lape.

Sengketa yang berkaitan dengan tanah ulayat masyarakat adat Lape tersebut terjadi pada tahun 2008. Para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut antara lain Konrardus Remi yang didukung oleh LPA Lape berhadapan dengan Efraim Fao serta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nagekeo. Obyek dari sengketa tersebut berlokasi di daerah Pomamela, Kelurahan Lape. Sengketa tanah ulayat tersebut

---

<sup>17</sup> <http://djockermadridistas.blogspot.com/2014/02/masyarakat-adat-lape.html>, *Masyarakat Adat Lape (Kabupaten Nagekeo)*, diakses tanggal 13 September 2014.

terjadi berawal dari penyerahan terhadap tanah ulayat yang dilakukan sepihak Efraim Fao kepada Pemerintah Daerah atau Pemda Kabupaten Nagekeo pada awal tahun 2008. Tanah yang telah diserahkan secara sepihak kepada Pemda Nagekeo tersebut seluas 1,5 Ha. Tindakan itu dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan LPA Lape maupun Konrardus Remi, selaku pemegang hak perseorangan di atas bidang tanah tersebut.

Penyerahan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari LPA Lape. Penyerahan atas tanah itu diketahui oleh LPA Lape dan Konrardus Remi pada awal bulan Mei tahun 2008. Penyerahan atas tanah atau lokasi itu diketahui setelah adanya kegiatan pembangunan gedung atau kantor DPRD Nagekeo. Kegiatan pembangunan kantor DPRD tersebut dilakukan di atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut. Tindakan Efraim Fao dalam melakukan penyerahan tanah itu dipandang sebagai suatu pelanggaran yang sangat serius. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap ketentuan hukum tanah ulayat dari masyarakat adat Lape. Ketentuan hukum adat mengatur bahwa yang berwenang menyerahkan tanah dari wilayah ulayat Lape kepada pihak dari luar masyarakat adat Lape adalah LPA Lape selaku perwakilan dari masyarakat adat Lape.

LPA Lape mengajukan keberatan terhadap Pemda Nagekeo agar kegiatan pembangunan tersebut ditunda terlebih dahulu. Keberatan itu diajukan dengan dalil bahwa Efraim Fao tidak berhak dan berwenang dalam menyerahkan tanah itu kepada Pemda Nagekeo. Keberatan dari LPA Lape itu mendapat respon yang negatif baik dari Pemda Nagekeo maupun Efraim Fao. LPA Lape juga mengupayakan mekanisme lain berupa perundingan diantara para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Mekanisme perundingan tersebut merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa non-litigasi secara tradisional. Mekanisme itu gagal terlaksana karena para pihak yang terlibat, khususnya Efraim Fao dan Pemda tidak mengabaikan mekanisme tersebut. Mekanisme

yang ditempuh selanjutnya adalah melalui jalur litigasi atau bersidang di Pengadilan. Putusan dari PN Bajawa hingga putusan Kasasi dari MA bahkan hingga putusan PK memenangkan pihak Konrardus Remi dan LPA Lape. LPA Lape juga mendorong agar diajukannya gugatan eksekutorial yang juga dikabulkan oleh PN Bajawa, yang berkekuatan hukum tetap atau *inkraht*.

LPA Lape terlibat dan berperan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat itu. Keterlibatan dan peranan LPA Lape dalam upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat itu berkaitan dengan tugas dan fungsi utamanya. LPA Lape memiliki tugas utama untuk mengayomi masyarakat adat Lape, adat istiadat, tradisi dan hukum adatnya. Fungsi utama dari LPA Lape sebagai alat kontrol ketertiban, keamanan, ketentraman serta kerukunan dalam masyarakat adat Lape. Tugas dan fungsi utama tersebut didukung oleh berbagai tugas dan fungsi lainnya sehingga mendukung keterlibatan serta peranan LPA Lape dalam cara atau mekanisme penyelesaian sengketa itu. Peranan LPA Lape dalam upaya penyelesaian sengketa tanah itu antara lain sebagai fasilitator, negosiator dan mediator serta hakim perdamaian dalam persidangan adat dan sebagai pengambil keputusan adat yang mengikat para pihak yang bersengketa. LPA Lape berperan dalam menciptakan kerukunan dalam masyarakat adat, di mana setiap perbuatan maupun tindakannya harus berdasarkan pada 3 sifat yaitu menjaga keamanan masyarakat adat Lape, memelihara kedamaian di antara masyarakat adat Lape dan memelihara derajat agama dan kepercayaan.

Tugas dan fungsi dari LPA Lape dalam penyelesaian sengketa itu disesuaikan dengan mekanismenya. LPA Lape berperan dalam penyelesaian sengketa alternatif itu sebagai fasilitator, mediator, serta negosiator. Peranan itu disesuaikan dengan tugas dan fungsi lainnya dari LPA Lape. Tugas itu adalah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi baik di dalam internal masyarakat adat Lape maupun dengan pihak eksternal dari masyarakat adat Lape. Fungsi tersebut adalah

sebagai lembaga penyelesai konflik maupun sengketa yang berkaitan dengan masyarakat adat Lape. Tugas maupun fungsi lainnya dari LPA Lape dilaksanakan pula dalam mekanisme penyelesaian alternatif atau non-litigasi tersebut. Tugas itu adalah untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat dari masyarakat adat Lape, khususnya terhadap sengketa tanah ulayat yang terjadi dengan pihak eksternal masyarakat adat Lape. Fungsi LPA Lape yang berkaitan dengan peranan LPA Lape itu adalah sebagai pemberi ijin dalam pemanfaatan terhadap tanah ulayat oleh pihak dari luar masyarakat adat Lape.

LPA Lape berperan sebagai negosiator dan saksi dalam metode penyelesaian litigasi. Peranan itu berkaitan dengan tugas dan fungsi dari LPA Lape. Peranan sebagai negosiator berkaitan dengan fungsi dari LPA Lape sebagai fungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat adat Lape. Peranan sebagai saksi itu berkaitan dengan tugas LPA Lape dalam memberikan pengakuan terhadap hak perseorangan atas tanah dalam wilayah ulayat Lape. LPA Lape juga berperan penting dalam proses ber perkara di Pengadilan. Peranan itu dilakukan dengan menyediakan dana guna mendukung proses untuk mencari keadilan bagi anggota masyarakat adatnya. LPA Lape bahkan harus menjual sebagian kekayaannya untuk membiayai proses yang tengah ditempuh di Pengadilan.

Tugas dan fungsi dari LPA Lape dalam penyelesaian sengketa tersebut telah memenuhi kepastian hukum. Hal tersebut didukung oleh berbagai putusan baik dari tingkat Pengadilan Negeri atau PN hingga tingkat Kasasi. Berbagai putusan tersebut memenangkan pihak LPA Lape dan Konrardus Remi. Berbagai putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap atau *inkraht*. Putusan Peninjauan Kembali atau PK yang diajukan oleh pihak Efraim Fao maupun Pemda Nagekeo tetap memenangkan pihak LPA Lape dan Konrardus Remi. Keadaan tersebut memperkuat dalil bahwa tugas dan fungsi LPA Lape dalam upaya penyelesaian sengketa itu telah memenuhi kepastian hukum.



Kepastian hukum yang dimaksud merupakan kepastian hukum atas data yuridis dan data fisik dari obyek sengketa. Kepastian hukum atas data fisik dari tanah sengketa tersebut terpenuhi dengan adanya kepastian tentang letak, batas dan luas. Tanah sengketa itu terletak di lokasi yang bernama Pomamela. Tanah sengketa tersebut berbatasan dengan tanah ulayat Lape maupun tanah Pemda Nagekeo. Tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut seluas 1,5 Ha. Kepastian hukum terhadap data yuridis dari obyek sengketa tersebut terpenuhi dengan adanya kepastian mengenai status atau jenis hak atas tanah dan pemegang hak atas tanah itu. Tanah yang disengketakan tersebut berstatus tanah ulayat dari masyarakat adat Lape, yang digarap oleh salah anggotanya yang bernama Konrardus Remi. Pemegang hak atas tanah tersebut adalah masyarakat adat Lape secara keseluruhan dan Konrardus Remi selaku penggarap tanah itu.itu

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan serta dianalisa dalam pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian terhadap sengketa tanah ulayat itu melibatkan peranan dari Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape. LPA Lape mempunyai tugas utama untuk mengayomi masyarakat adat Lape, adat istiadat, tradisi serta hukum adatnya. Fungsi utama dari LPA Lape sebagai alat kontrol ketertiban, keamanan, ketentraman serta kerukunan dalam masyarakat adat Lape. Tugas dan fungsi utama itu didukung dengan berbagai tugas dan fungsi lainnya dari LPA Lape. Berbagai tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan dan disesuaikan dengan mekanisme atau metode penyelesaian sengketa. Penyelesaian terhadap sengketa tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) metode yaitu metode penyelesaian sengketa Alternatif (Non-litigasi) dan Metode Penyelesaian Melalui Litigasi.
2. Tugas dan Fungsi Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat adat Lape telah memenuhi kepastian hukum dengan adanya putusan pengadilan dalam berbagai tingkatan. Kepastian hukum dalam sengketa tersebut meliputi kepastian hukum atas data yuridis dan data fisik terhadap bidang tanah yang merupakan obyek sengketa itu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Al. Sony Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Arbitrase*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Maria S. W. Sumardjono, 2007, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

-----, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung.

Sem Karoba, 2007, *Hak Asasi Masyarakat Adat United Nations Declaration on The Rights of Indigeous Peoples*, Yogyakarta, GalangPress.

### Laporan Penelitian :

C. Woro Murdiati dkk, 2011, *Rekonstruksi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Sebagai Fundasi Pembangunan Hukum Kehutanan yang Berkelanjutan*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### Tesis :

Rafael Edy Bosko, 1999, *The Right of Indigenous Peoples in the Context of Natural Resources Development*, a master thesis in public international law, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, Faculty of Law, University of Lund.

Maria D. Muga, 2008, *Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi (Studi Analisa Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah-Tanah Ulayat di Kecamatan Soa-Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur)*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang

**Seminar**

Mahfud MD, 2009, *Penegakan Hukum Pengelolaan Tata Pemerintahan yang Baik*, Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Jakarta, 8 Januari 2009.

**Non Publikasi:**

Yoseph Soa Seda, 2014, *Masyarakat Adat Lape dan Hukum Tanah Ulayat Lape*.

**Internet:**

<http://djockermadridistas.blogspot.com/2014/02/masyarakat-adat-lape.html>, *Masyarakat Adat Lape (Kabupaten Nagekeo)*, Diakses pada tanggal 13 September 2014.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6522/tanah-ulayat>, Diakses pada tanggal 10 Desember 2014.

[https://www.academia.edu/1475460/Hak\\_Masyarakat\\_Adat\\_dalam\\_Perspektif\\_H\\_km\\_Intl](https://www.academia.edu/1475460/Hak_Masyarakat_Adat_dalam_Perspektif_H_km_Intl), Diakses pada tanggal 24 Maret 2014.

<http://www.scribd.com/doc/221104549/Makalah-Lembaga-Adat-Dan-Peranannya#scribd>, diakses pada tanggal 10 Desember 2014.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang *Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang *Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

**Kamus:**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

**Wawancara:**

Wawancara dengan Lembaga Persekutuan Adat (LPA) Lape, Bapak Fidelis Philipus Libha (Ketua LPA Lape), Bapak Fabianus Doze (Wakil Ketua LPA Lape) dan Ketua Suku Nakanawe, Bapak Markus Aku.

Wawancara dengan Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara di Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo, Ibu Monika E. I. Saquera, SH.